

Rendahnya Partisipasi Perempuan Dalam Pencalonan Kepala Desa Di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat

Fitrah Hamzah¹, Maria Fransiska Ugha Buu², Vinsensius Herianto Ndori³

Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Muhammdiyah Maumere, NTT, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 22 November 2025

Revised: 11 Desember 2025

Accepted: 30 Desember 2025

Keywords:

Partisipasi perempuan

Pencalonan

Kepala desa

How to Cite:

Hamzah, F., Buu, M. F. U., & Ndori, V. H. (2025). Rendahnya Partisipasi Perempuan Dalam Pencalonan Kepala Desa Di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat. *Tut Wuri Handayani: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 4(4).

<https://doi.org/10.59086/jkip.v4i4.1219>

ABSTRACT

Partisipasi politik perempuan merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya demokrasi yang inklusif, namun di Desa Duwanur keterlibatan perempuan dalam pencalonan kepala desa masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi perempuan dalam pencalonan kepala desa serta mengidentifikasi upaya yang dapat meningkatkan partisipasi tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dari pemerintah desa, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi perempuan dipengaruhi oleh kuatnya budaya patriarki, keterbatasan pendidikan politik, rendahnya kepercayaan diri, serta minimnya dukungan pemerintah desa. Temuan utama menegaskan bahwa pendidikan politik yang berkelanjutan dan dukungan institusional dari pemerintah desa berperan signifikan dalam meningkatkan kapasitas dan keberanian perempuan untuk terlibat dalam pencalonan kepala desa. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah desa dalam merancang kebijakan pemberdayaan perempuan guna mendorong demokrasi desa yang lebih partisipatif dan berkeadilan gender.

Women's political participation is an important prerequisite for the realization of inclusive democracy, but in Duwanur Village, women's involvement in village head elections is still low. This study aims to analyze the level of women's participation in village head elections and identify efforts that can increase this participation. The study uses a descriptive qualitative approach with primary data sources from the village government, women leaders, and community leaders, as well as secondary data in the form of laws and regulations and related literature. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, then analyzed through the stages of reduction, presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that low female participation is influenced by strong patriarchal culture, limited political education, low self-confidence, and minimal support from the village government. The main findings confirm that continuous political education and institutional support from the village government play a significant role in increasing women's capacity and courage to participate in village head elections. This study provides practical implications for village governments in designing women's empowerment policies to promote a more participatory and gender-equitable village democracy.

This is an open access article under the [CC BYSA](#) license



Corresponding Author:

Maria Ermilinda Dua lering

Univeristas Muhammdoiyah Maumere

Jalan Moan Subu Sadipun, Maumere, NTT

marlinlring85@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara demokrasi menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama dalam sistem pemerintahannya. Salah satu indikator penting demokrasi adalah keterlibatan warga negara dalam proses politik, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengisian jabatan publik. Partisipasi politik tidak hanya mencerminkan kualitas demokrasi, tetapi juga menjadi sarana bagi warga negara untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi kelompoknya (Priandi & Roisah, 2019).

Dalam konteks ini, kesetaraan hak politik antara laki-laki dan perempuan merupakan prasyarat fundamental bagi terwujudnya demokrasi yang inklusif.

Komitmen negara terhadap kesetaraan tersebut tercermin dalam kerangka konstitusional dan kebijakan afirmatif, salah satunya melalui ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar calon legislatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kebijakan ini menegaskan bahwa partisipasi perempuan dalam politik bukan semata persoalan jumlah, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang selama ini membatasi akses perempuan ke ruang-ruang kekuasaan politik.

Secara teoretis, pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik telah lama menjadi perhatian kajian global. Paxton dan Hughes (dalam Garis & Trisnia, 2021) menempatkan keterlibatan perempuan dalam politik sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sejalan dengan itu, Dahlerup (dalam Garis & Trisnia, 2021) mengemukakan tiga argumentasi utama keterwakilan politik perempuan, yakni argumentasi keadilan, pengalaman, dan kepentingan kelompok. Perspektif ini menegaskan bahwa kehadiran perempuan dalam politik membawa sudut pandang, pengalaman, dan kepentingan yang berbeda dan tidak dapat digantikan oleh laki-laki.

Refleksi global, seperti Konferensi Dunia tentang Perempuan di Beijing tahun 1995, juga menekankan dua agenda utama, yaitu peningkatan jumlah perempuan dalam politik dan penguatan kapasitas politik mereka. Dengan demikian, partisipasi perempuan tidak hanya dipahami secara kuantitatif, tetapi juga kualitatif, mencakup sejauh mana perempuan mampu berperan, memengaruhi kebijakan, dan memperjuangkan isu-isu strategis dalam proses politik (Ahmad et al., 2019). Sejumlah studi menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan berkontribusi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, legitimasi institusi demokrasi, serta efektivitas kebijakan publik (Nations and Programme, n.d.; Kahpi, 2024; Arsyadi, 2023).

Namun, realitas empiris di Indonesia menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik masih menghadapi berbagai hambatan. Data World Bank (2019) menempatkan Indonesia pada posisi ke-7 terendah di Asia Tenggara dalam hal keterlibatan perempuan di parlemen. Partisipasi perempuan yang masih terbatas ini tidak terlepas dari kuatnya bias gender dan konstruksi sosial yang memposisikan politik dan kepemimpinan sebagai ranah laki-laki. Perempuan kerap mengalami diskriminasi, baik secara struktural maupun kultural, yang membatasi peluang mereka untuk tampil sebagai aktor politik (Dewi et al., 2022).

Kondisi tersebut juga tercermin di tingkat regional, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Gladies Damainantha Nalle et al. (2024) menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan di NTT masih terkonsentrasi pada sektor domestik dan informal, sehingga keterlibatan mereka dalam ruang publik dan politik relatif rendah. Selain faktor ekonomi, hambatan kultural berupa stigma dan diskriminasi terhadap perempuan yang ingin terlibat dalam politik turut memperkuat marginalisasi perempuan di wilayah ini.

Pada level lokal, Desa Duwanur di Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, memperlihatkan fenomena yang sejalan dengan konteks nasional dan regional tersebut. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik desa, khususnya dalam pencalonan kepala desa, masih sangat rendah. Budaya patriarki yang kuat membentuk pandangan masyarakat bahwa kepemimpinan desa lebih layak dipegang oleh laki-laki. Hal ini tercermin dari struktur pemerintahan desa yang didominasi laki-laki, meskipun secara objektif terdapat perempuan dengan tingkat pendidikan dan kapasitas yang memadai untuk memimpin.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji partisipasi politik perempuan pada level nasional dan daerah, terutama dalam konteks parlemen, kebijakan afirmatif, dan representasi formal. Namun, kajian yang secara khusus menyoroti partisipasi perempuan dalam pencalonan kepala desa, terutama dengan pendekatan kontekstual di tingkat desa, masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung menekankan faktor struktural dan normatif, sementara dinamika kultural, persepsi masyarakat, serta pengalaman perempuan di tingkat desa belum dieksplorasi secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi penting untuk mengisi celah tersebut dengan menghadirkan

analisis empiris mengenai penyebab rendahnya partisipasi perempuan dalam pencalonan kepala desa di Desa Duwanur, sekaligus mengkaji upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong peningkatan partisipasi perempuan di tingkat lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi perempuan dalam pencalonan kepala desa serta merumuskan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses tersebut. Atas dasar itu, penelitian ini berjudul “Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam Pencalonan Kepala Desa di Duwanur Kecamatan Adonara Barat.”

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang dipilih karena dinilai paling tepat untuk memahami secara mendalam fenomena rendahnya partisipasi perempuan dalam pencalonan kepala desa. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menelusuri makna, pengalaman, serta pandangan subjek penelitian secara komprehensif dalam konteks sosial dan budaya yang melingkupinya. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman realitas sosial berdasarkan perspektif subjek penelitian dalam kondisi alamiah (Sudaryono dalam Kusuma, 2025). Sejalan dengan itu, Bogdan dan Biklen (dalam Dawis et al., 2023) menegaskan bahwa penelitian kualitatif bersifat deskriptif, menekankan pada proses, serta menggunakan data berupa kata-kata yang diperoleh melalui interaksi langsung dengan sumber data. Oleh karena itu, penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena sosial secara mendalam.

Penelitian dilaksanakan di Desa Duwanur, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, yang dipilih secara purposif karena menunjukkan fenomena rendahnya partisipasi perempuan dalam pencalonan kepala desa. Pengumpulan data dilakukan selama dua minggu, yakni pada 12–25 Februari 2025.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dipilih dengan pertimbangan memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait proses pencalonan kepala desa, memahami dinamika sosial-politik di Desa Duwanur, serta bersedia memberikan informasi secara terbuka. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang, yang terdiri atas 3 aparatur Pemerintah Desa Duwanur, 3 tokoh perempuan desa, dan 3 tokoh masyarakat. Penentuan jumlah informan didasarkan pada prinsip kecukupan data (data saturation), yaitu pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak menghasilkan temuan baru yang signifikan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, yang mencakup pandangan, pengalaman, serta persepsi informan terkait partisipasi perempuan dalam pencalonan kepala desa. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung, seperti buku pustaka, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, skripsi dan laporan penelitian terdahulu, serta arsip Kantor Desa Duwanur. Data sekunder digunakan untuk memperkuat dan melengkapi temuan data primer.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi sosial, budaya, kebiasaan, serta dinamika masyarakat Desa Duwanur terkait partisipasi perempuan dalam politik lokal. Wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka kepada informan terpilih guna menggali informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi perempuan, dengan menggunakan alat perekam setelah memperoleh persetujuan informan untuk menjaga keakuratan data. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis dan visual, seperti foto kegiatan, arsip desa, surat keputusan, serta dokumen peraturan, yang berfungsi sebagai data pendukung hasil observasi dan wawancara.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama (Calesna et al., 2020), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih, merangkum, dan mengorganisasi data mentah agar relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi dan kategori tematik untuk memudahkan pemahaman dan analisis. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menafsirkan data, mengidentifikasi pola dan hubungan antar informasi, serta melakukan pengecekan ulang untuk memastikan keabsahan temuan sebelum menarik kesimpulan akhir.

Untuk meningkatkan kredibilitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan serta dari berbagai teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Melalui triangulasi ini, diharapkan hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan dan validitas yang lebih tinggi.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pemerintah desa, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat. Data juga diperkuat dengan hasil observasi langsung terhadap kondisi sosial, budaya, serta pola partisipasi masyarakat, khususnya perempuan, dalam proses pencalonan kepala desa. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan yang bertujuan memahami secara mendalam faktor penyebab rendahnya partisipasi perempuan dalam pencalonan kepala desa serta upaya yang dapat dilakukannya untuk meningkatkannya.

Bagian analisis juga menyajikan deskripsi umum mengenai kondisi Desa Duwanur sebagai konteks penelitian. Desa ini memiliki tiga dusun dengan total penduduk 1.159 jiwa dan karakteristik sosial budaya yang sangat dipengaruhi oleh adat Lamaholot. Kondisi geografis, sejarah desa, distribusi penduduk, distribusi pendidikan, serta ketersediaan sarana pendidikan memberikan gambaran awal mengenai struktur sosial masyarakat yang menjadi latar munculnya fenomena rendahnya partisipasi perempuan dalam politik lokal.

Seluruh temuan dianalisis secara deskriptif dengan mengaitkan data empiris dari wawancara dan observasi dengan teori-teori yang relevan, terutama mengenai partisipasi politik perempuan, budaya patriarki, serta peran adat dalam struktur sosial masyarakat.

Deskripsi Hasil Temuan Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Duwanur sebagai Konteks Sosial Penelitian

Desa Duwanur memiliki luas wilayah 3,5 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.159 jiwa yang tersebar di tiga dusun. Desa ini merupakan desa dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Kecamatan Adonara Barat, dengan pola permukiman yang mengikuti garis pesisir dari Manuk Erin hingga Crowerian. Secara administratif, Desa Duwanur berbatasan dengan Laut Flores di bagian utara, Desa Waitukan di selatan, Desa Homa di barat, dan Desa Adonara di timur.

Secara historis, Desa Duwanur terbentuk melalui kebijakan pemerintah pada tahun 1962 dan disahkan kembali pada tahun 1964, kemudian mengalami pemekaran pada tahun 1982. Hingga saat ini, desa ini telah dipimpin oleh 17 kepala desa, seluruhnya laki-laki. Fakta ini menunjukkan bahwa sejak awal terbentuknya desa hingga sekarang, kepemimpinan desa sepenuhnya berada dalam dominasi laki-laki, yang secara tidak langsung membentuk konstruksi sosial mengenai siapa yang dianggap layak memimpin.

Komposisi penduduk Desa Duwanur relatif seimbang antara laki-laki (598 jiwa) dan perempuan (561 jiwa). Tingkat pendidikan masyarakat bervariasi dari lulusan sekolah dasar hingga perguruan tinggi, meskipun mayoritas masih berada pada jenjang SD dan SMP. Kondisi ini menjadi konteks penting dalam

memahami kapasitas, peluang, dan hambatan partisipasi politik perempuan di tingkat desa.

2. Pola Utama Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam Pencalonan Kepala Desa

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa tidak pernah ada perempuan yang mencalonkan diri maupun dicalonkan sebagai Kepala Desa Duwanur. Temuan ini menunjukkan adanya pola partisipasi politik yang timpang dan berulang dalam setiap periode pemilihan kepala desa.

a. Dominasi Budaya Patriarki dan Norma Adat

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa budaya patriarki Lamaholot menjadi faktor paling dominan yang membatasi partisipasi perempuan. Dalam praktik adat, perempuan tidak dilibatkan secara setara dalam forum musyawarah, terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis desa. Seorang tokoh perempuan menjelaskan bahwa perempuan “tidak duduk sejajar dengan laki-laki dalam musyawarah adat”, yang berdampak pada terbentuknya persepsi sosial bahwa perempuan tidak layak berada dalam posisi kepemimpinan. Kondisi ini menegaskan bahwa hambatan perempuan bersifat kultural dan simbolik, bukan semata persoalan kemampuan individu.

b. Hambatan Psikologis dan Rendahnya Kepercayaan Diri Perempuan

Selain faktor budaya, penelitian ini menemukan adanya hambatan psikologis yang kuat, terutama berupa rendahnya rasa percaya diri perempuan. Plh. Kepala Desa menyatakan bahwa perempuan cenderung “tidak berani maju” karena merasa tidak mendapat dukungan masyarakat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa tekanan sosial dan ekspektasi budaya secara internal telah membentuk keraguan perempuan terhadap kapasitas kepemimpinan mereka sendiri.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh informan perempuan generasi muda yang menyatakan bahwa perempuan tidak memiliki ruang yang cukup untuk mempersiapkan diri sebagai calon pemimpin. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi perempuan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil proses sosial yang berlangsung lama dan berlapis.

c. Keterbatasan Pendidikan Politik dan Ketiadaan Role Model

Faktor lain yang memperkuat rendahnya partisipasi perempuan adalah minimnya pendidikan politik dan ketiadaan figur teladan (role model) perempuan di Desa Duwanur. Tokoh masyarakat menilai bahwa karena belum pernah ada kepala desa perempuan, masyarakat sulit membayangkan perempuan sebagai pemimpin. Kondisi ini menciptakan lingkaran eksklusif, di mana ketiadaan role model memperkuat stereotip gender, yang pada akhirnya kembali menghambat kemunculan calon perempuan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi perempuan dalam pencalonan kepala desa merupakan hasil interaksi antara faktor budaya, psikologis, struktural, dan edukatif. Hambatan-hambatan ini saling terkait dan memperkuat satu sama lain.

3. Strategi dan Peluang Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pencalonan Kepala Desa

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, penelitian ini juga menemukan adanya peluang dan strategi potensial untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik desa.

a. Penguatan Kapasitas dan Pendidikan Politik Perempuan

Sebagian besar informan menekankan pentingnya pelatihan kepemimpinan dan pendidikan politik bagi perempuan. Pendidikan politik dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman perempuan tentang hak, peran, dan peluang mereka dalam politik lokal. Analisis ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi perempuan perlu dimulai dari penguatan kapasitas individual, bukan hanya perubahan kebijakan formal.

b. Perluasan Ruang Partisipasi Perempuan dalam Organisasi Desa

Temuan lain menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam organisasi desa seperti PKK,

Posyandu, dan kegiatan sosial lainnya dapat menjadi ruang pembelajaran kepemimpinan. Partisipasi ini tidak hanya memperkuat keterampilan organisasi perempuan, tetapi juga membangun legitimasi sosial mereka di mata masyarakat desa.

c. Dukungan Keluarga dan Perubahan Persepsi Masyarakat

Dukungan keluarga dan masyarakat dinilai sebagai faktor kunci dalam membangun keberanian perempuan untuk terlibat dalam pencalonan kepala desa. Tanpa dukungan sosial yang memadai, perempuan akan terus menghadapi tekanan psikologis dan sosial. Oleh karena itu, perubahan persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan menjadi prasyarat penting bagi peningkatan partisipasi perempuan.

4. Sintesis Temuan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi perempuan dalam pencalonan kepala desa di Desa Duwanur bukan sekadar persoalan individu, melainkan persoalan struktural dan kultural yang terinstitusionalisasi. Budaya patriarki, rendahnya kepercayaan diri, minimnya pendidikan politik, dan ketiadaan role model membentuk pola eksklusif perempuan dari arena kepemimpinan desa. Temuan ini memperkuat argumen bahwa upaya peningkatan partisipasi perempuan harus dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan kontekstual sesuai karakteristik sosial budaya desa.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pencalonan Kepala Desa Duwanur berada pada tingkat yang sangat rendah, ditandai dengan tidak pernah adanya perempuan yang mencalonkan diri dalam sejarah pemilihan kepala desa. Temuan ini memperkuat teori partisipasi yang menyatakan bahwa keterlibatan individu dalam aktivitas politik tidak semata ditentukan oleh kapasitas personal, melainkan sangat dipengaruhi oleh dukungan sosial, norma budaya, dan relasi kekuasaan yang berlaku dalam masyarakat (Siregar, 2020). Dengan demikian, rendahnya partisipasi perempuan di Desa Duwanur tidak dapat dipahami sebagai kurangnya kemampuan perempuan, tetapi sebagai hasil dari struktur sosial yang membatasi akses mereka ke arena politik.

Dalam kerangka teori partisipasi politik perempuan, temuan ini mengonfirmasi pandangan bahwa politik masih dikonstruksikan sebagai ranah maskulin. Misbah Zulfa Elizabeth menyatakan bahwa perempuan sering memandang politik sebagai ruang yang asing dan tidak ramah, bukan karena ketidakmampuan, melainkan karena pengalaman sosial yang membentuk persepsi tersebut. Temuan di Desa Duwanur menunjukkan bahwa persepsi ini diperkuat oleh praktik budaya Lamaholot yang menempatkan perempuan terutama dalam peran domestik dan membatasi keterlibatan mereka dalam musyawarah adat. Dengan demikian, budaya tidak hanya berfungsi sebagai latar sosial, tetapi sebagai mekanisme simbolik yang mereproduksi eksklusif perempuan dari ruang pengambilan keputusan.

Namun, penelitian ini tidak sekadar memposisikan budaya Lamaholot sebagai faktor penghambat yang statis. Secara reflektif, budaya Lamaholot juga dapat dipahami sebagai sistem nilai yang menata relasi sosial dan otoritas dalam komunitas. Dalam konteks ini, pembatasan terhadap perempuan bukanlah akibat dari ketiadaan potensi, melainkan dari penafsiran budaya yang belum memberi ruang setara bagi kepemimpinan perempuan. Temuan ini memperluas teori partisipasi politik perempuan dengan menunjukkan bahwa hambatan kultural bersifat kontekstual dan dapat berubah seiring adanya reinterpretasi nilai adat dan transformasi sosial.

Faktor patriarki yang kuat di Desa Duwanur juga mempertegas teori tentang hambatan struktural terhadap partisipasi perempuan. Struktur sosial desa yang didominasi laki-laki tidak hanya membatasi akses perempuan secara formal, tetapi juga membentuk hambatan psikologis berupa rendahnya rasa percaya diri. Temuan ini memperkuat argumentasi Surbakti bahwa faktor internal perempuan sering kali merupakan dampak lanjutan dari tekanan eksternal berupa norma sosial dan stereotip gender.

Dengan kata lain, rendahnya kepercayaan diri perempuan bukan penyebab utama, melainkan konsekuensi dari struktur patriarkal yang telah mengakar.

Ketiadaan figur teladan perempuan dalam kepemimpinan desa juga memberikan kontribusi penting dalam dialog teori dan temuan. Teori pembelajaran sosial menekankan bahwa keberadaan role model berperan besar dalam membentuk aspirasi dan keberanian individu untuk terlibat dalam politik. Temuan penelitian ini mengkritisi pendekatan normatif yang menganggap kesetaraan hukum sudah cukup untuk mendorong partisipasi perempuan. Dalam praktiknya, tanpa representasi nyata di tingkat lokal, kesetaraan normatif belum mampu mengubah persepsi dan perilaku politik masyarakat desa.

Lebih lanjut, usulan upaya peningkatan partisipasi perempuan yang muncul dari informan—seperti pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, keterlibatan dalam organisasi desa, serta dukungan keluarga—menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi kepemimpinan yang dapat berkembang ketika hambatan struktural dan kultural mulai dikurangi. Temuan ini memperluas teori partisipasi politik perempuan dengan menekankan pentingnya pendekatan bertahap dan kontekstual, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki ikatan adat dan budaya yang kuat.

Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi teori-teori tentang hambatan struktural dan kultural terhadap partisipasi politik perempuan, tetapi juga memperkaya teori tersebut melalui analisis kontekstual budaya Lamaholot. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pemahaman bahwa budaya lokal tidak bersifat monolitik dan deterministik, melainkan dapat menjadi ruang dialog dan transformasi dalam mendorong kepemimpinan perempuan di tingkat desa. Dengan demikian, peningkatan partisipasi perempuan dalam pencalonan kepala desa memerlukan strategi yang tidak hanya berbasis kebijakan formal, tetapi juga sensitif terhadap nilai, struktur, dan dinamika budaya lokal.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa rendahnya partisipasi perempuan dalam pencalonan Kepala Desa Duwanur tidak semata-mata merupakan persoalan individual, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara struktur kelembagaan desa, konstruksi budaya patriarki, dan proses internalisasi peran gender oleh perempuan itu sendiri. Temuan ini memperluas pemahaman teori partisipasi politik perempuan dengan menunjukkan bahwa pada konteks masyarakat adat seperti Lamaholot, hambatan partisipasi tidak hanya bersifat struktural dan kultural, tetapi juga bekerja secara simbolik melalui legitimasi adat yang menormalisasi eksklusi perempuan dari ruang kepemimpinan politik.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat sekaligus mengkritisi pendekatan klasik partisipasi politik yang menekankan faktor pendidikan dan sumber daya semata. Temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun perempuan memiliki potensi dan kapasitas, partisipasi tetap terhambat ketika norma budaya dan struktur kekuasaan adat tidak menyediakan ruang simbolik dan sosial bagi kepemimpinan perempuan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan teori partisipasi politik perempuan melalui perspektif kontekstual berbasis budaya lokal.

Secara praktis, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam politik desa tidak dapat dilakukan secara instan atau normatif, tetapi memerlukan strategi pemberdayaan yang berkelanjutan dan sensitif terhadap konteks budaya setempat. Ketiadaan figur teladan perempuan dan lemahnya intervensi kelembagaan desa menjadi faktor kunci yang perlu ditangani secara sistematis agar perempuan tidak hanya hadir sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek kepemimpinan politik di tingkat lokal.

Referensi

- Adriani, S., & Maulia, S. T. (2024). Partisipasi perempuan dalam politik. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 131–136. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.287>
- Ahmad, A., Mahmood, Q. K., Saud, M., & Mas'udah, S. (2019). Women in democracy: The political participation of women. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 32(2), 114–122. <https://doi.org/10.20473/mkp.v32i22019.114-122>
- Arsyadi, W. (2023). Partisipasi perempuan dalam politik di Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat
- Calesna, V., Batu Bara, B. M., & Angelia, N. (2020). Partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa (Studi pada Kantor Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru). *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(2), 128–136. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v2i2.351>
- Citriadin, Y. (2020). Metode penelitian kualitatif (Suatu pendekatan dasar). Sanabil Creative.
- Dawis, A. M., Meylani, Y., Heryana, N., Alfathoni, M. A. M., Sriwahyuni, E., Ristiyana, R., Januarsy, Y., Wiratmo, P. A., Dasman, S., Mulyani, S., Agit, A., Shoffa, S., & Baali, Y. (2023). Pengantar metodologi penelitian.
- Dewi, A. A. I. A. A., Yuniti, I. G. A. D., Yanti, A. A. I. E. K., & Dewi, G. A. A. P. (2022). Partisipasi perempuan dalam politik dan jabatan publik di Kota Denpasar.
- Garis, R. R., & Trisnia, T. (2021). Partisipasi politik perempuan dalam pemilihan kepala desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 171–177.
- Haumeni, I. R. (2022). Desa dalam pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Kupang pada tahun 2018
- Ikhsan, R. (2023). Women's participation in political parties. *Social Science Studies*, 3(6), 516–544. <https://doi.org/10.47153/ss36.6712023>
- Inglehart, R., & Norris, P. (2003). *Rising tide: Gender equality and cultural change around the world*. Cambridge University Press.
- Kahpi, L. (2024). Analisis partisipasi politik perempuan di Indonesia: Faktor penghambat dan pendorong. *Analisis Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*, 8(1), 66.
- Krook, M. L. (2010). *Quotas for women in politics: Gender and candidate selection reform worldwide*. Oxford University Press.
- Kusuma, S. (2025). Partisipasi perempuan dalam kepemimpinan sebagai kepala desa di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Banten. *Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik*, 8(1), 72–94.
- Muspawi, S. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Jurnal Edu Research: Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies (IICLS)*, 5(3), 110–116.
- Nalle, G. D., Lawalu, S. P. A., & Peten, Y. Y. P. (2024). Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di Desa Pledo. *Jurnal Nusantara Berbakti*, 2(3), 76–86. <https://doi.org/10.59024/jnb.v2i3.382>
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106–116. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.106-116>
- Paxton, P., Kunovich, S., & Hughes, M. M. (2007). Gender in politics. *Annual Review of Sociology*, 33, 263–284. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.33.040406.131651>
- Ramadhan, I. (2023). Analisis partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengembangan sektor pariwisata Bukit Lawang Kecamatan Bahorok. *Edunomika*, 8(1), 1–11.
- Siregar, E. Z. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan lingkungan. *Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, 3, 144–146.
- Sutriani, E., & Octaviani, R. (2019). Analisis data dan pengecekan keabsahan data. *INA-Rxiv*, 1–22.
- Talaohu, R. A. (2021). Partisipasi politik kaum perempuan dalam pemilu legislatif di Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan. *Besterkunde: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 16–17.

Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Harvard University Press

Sumber Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1)–(2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 173 ayat (2) huruf e.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 1 ayat (5), ayat (9), dan Pasal 21.

.